



Penerapan Peran UMKM dalam Membangun Ekonomi Syariah di Kota Medan

Ariqah Luthfiyah¹, Atikah Humaidah², Dewi Fazira³, Intan Alisa⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Alamat: Jl. IAIN No. 1 Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20235.

Email: ariqahluthfiyyah23@gmail.com¹, atikahibs777@gmail.com², ddewi3792@gmail.com³,
alisanasutionintan@gmail.com⁴

Abstract. *The development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) is very important in supporting economic growth in the city of Medan. In the context of sharia economics, MSMEs act as the backbone of the economy, creating jobs, diversifying products, and empowering communities. However, they are faced with challenges such as limited access to capital, education, and regulations. This research analyzes the role of MSMEs from a sharia perspective, identifies challenges, and provides policy recommendations. The results show that MSMEs play an important role in overcoming poverty, creating diverse local products, and supporting an inclusive economy. Therefore, solutions are needed to financial, educational, marketing and regulatory challenges. Support from the government, financial institutions and universities together with sharia economic development can optimize the contribution of MSMEs in supporting sustainable economic growth in Medan City. In this way, MSMEs can become a driving force for economic growth which will have a positive impact on the people of Medan City.*

Keywords: *MSMEs, Sharia Economics, Economic Development.*

Abstrak. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Medan. Dalam konteks ekonomi syariah, UMKM berperan sebagai tulang punggung ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mendiversifikasi produk, dan memberdayakan masyarakat. Namun, mereka dihadapkan pada tantangan seperti akses terbatas terhadap modal, pendidikan, dan regulasi. Penelitian ini menganalisis peran UMKM dalam perspektif syariah, mengidentifikasi tantangan, dan memberikan rekomendasi kebijakan. Hasilnya menunjukkan bahwa UMKM berperan penting dalam mengatasi pengangguran, menciptakan produk lokal yang beragam, dan mendukung ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, diperlukan solusi terhadap tantangan keuangan, pendidikan, pemasaran, dan regulasi. Dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan, dan perguruan tinggi bersama dengan pengembangan ekonomi syariah dapat mengoptimalkan kontribusi UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Medan. Dengan demikian, UMKM dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang membawa dampak positif bagi masyarakat di kota Medan.

Kata kunci: UMKM, Ekonomi Syariah, Pembangunan Ekonomi.

1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam konteks ekonomi syariah di Kota Medan. Sebagai tulang punggung ekonomi, UMKM berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, diversifikasi produk, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Di Kota Medan, UMKM tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi banyak orang tetapi juga alat untuk mencapai kesetaraan dan distribusi kekayaan yang merata dalam kerangka ekonomi syariah.

UMKM di Kota Medan berperan signifikan dalam menopang pertumbuhan ekonomi lokal. Mereka menyumbang sekitar 99% dari keseluruhan unit usaha dan berkontribusi

sebesar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Dalam konteks ekonomi syariah, UMKM membantu mengatasi pengangguran dan mendukung ekonomi inklusif dengan menciptakan produk lokal yang beragam. Namun, UMKM menghadapi berbagai tantangan seperti akses terbatas terhadap modal, pendidikan, dan regulasi yang perlu diatasi untuk memaksimalkan potensinya. Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan ekonomi syariah di Kota Medan masih menghadapi beberapa kendala. Dukungan dari Pemerintah Kota Medan terkait ekonomi dan bisnis Islam masih kurang optimal. Selain itu, tingkat partisipasi umat Islam dalam layanan keuangan dan bisnis syariah masih rendah meskipun mayoritas penduduk Kota Medan adalah Muslim. Namun, adanya potensi pasar yang besar dan kondisi sosial-ekonomi yang stabil memberikan peluang signifikan bagi pengembangan ekonomi syariah di kota ini.

Salah satu alasan utama mengapa UMKM begitu penting adalah kemampuannya dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam situasi di mana angka pengangguran merupakan tantangan serius bagi banyak negara, UMKM menjadi penyedia lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan. Pemerintah, sektor swasta, dan pelaku usaha perorangan menyadari pentingnya peran ini. Mereka melihat UMKM sebagai peluang emas untuk mengurangi angka pengangguran, memperkuat struktur ekonomi, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat (Halim, 2020).

Dalam mengelola bisnis UMKM, pelaku usaha perorangan dapat mengekspresikan kreativitas dan inovasi mereka. Mereka dapat menghasilkan produk yang unik dan layanan yang spesifik, menciptakan identitas bisnis yang kuat di pasar. Sementara itu, pemerintah memberikan berbagai program dan insentif untuk mendukung pertumbuhan UMKM, seperti pelatihan keterampilan, akses terhadap pembiayaan, dan bimbingan dalam pengelolaan usaha (Sofyan, 2021).

UMKM mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian Kota Medan. Usaha kecil dan menengah (UKM) memberikan kesempatan kepada penduduk setempat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah, untuk membangun usaha mereka sendiri. Selain itu, dengan menghadirkan produk-produk lokal yang baru dan orisinal, UMKM juga berkontribusi terhadap diversifikasi ekonomi. Banyak usaha kecil dan menengah (UKM) di Kota Medan yang meraih kesuksesan dalam skala lokal, nasional, bahkan global dengan cara berinovasi dan kreatif. (Ariza & Aslami, 2021).

Dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan sangat penting untuk mengoptimalkan kontribusi UMKM dalam pembangunan ekonomi syariah. Pemerintah juga dapat memperkuat peran stakeholder ekonomi syariah di Kota Medan melalui kebijakan yang

mendukung pengembangan UMKM berbasis syariah. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini dan memanfaatkan peluang yang ada, UMKM dapat memainkan peran lebih besar dalam membangun ekonomi syariah di Kota Medan, menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

2. LANDASAN TEORI

a. Pengertian UMKM

Salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian Indonesia kini terdiri dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dibandingkan dengan perusahaan industri skala besar, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lebih banyak sehingga memungkinkan mereka menyerap lebih banyak tenaga kerja dan mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pertumbuhan. Fakta ini memerlukan penetapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertumbuhan dan operasional UMKM. Bisnis yang termasuk dalam kategori “usaha mikro, kecil, dan menengah” (UMKM) sering kali dijalankan oleh individu atau sekelompok kecil individu dengan jumlah investasi awal yang kecil yang bertujuan untuk menciptakan usaha yang menguntungkan dan dapat beradaptasi dengan perubahan pasar. kondisi.. Furqon dalam (Arifudin, 2020) berpendapat bahwasannya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dicirikan oleh kurangnya ukuran, modal, aset, dan karyawan di berbagai industri. Sebagai industri yang tidak memerlukan biaya besar untuk menjalankan usahanya, UMKM nampaknya mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Di tengah memburuknya perekonomian dan prospek kebangkrutan perusahaan, UMKM mampu bertahan. Jadi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diyakini bisa mendongkrak perekonomian apapun yang terjadi.

Menurut (Labetubun, 2021) pentingnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bagi perekonomian. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berpotensi mendongkrak nilai ekspor nasional, menciptakan lapangan kerja baru, dan berkontribusi lebih besar terhadap penciptaan PDB. Kegiatan ekonomi kerakyatan sebagian besar ditempati oleh para pelaku UMKM. Tidak akan ada kemajuan ekonomi tanpa kehadiran pelaku UMKM. Perusahaan di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus memiliki sumber daya untuk membantu menumbuhkan perekonomian bangsa, khususnya dalam memenuhi permintaan

pelanggan. Di era masyarakat ekonomi ASEAN saat ini diharapkan barang-barang UMKM mampu bersaing dalam skala global.

Selain itu, berikut pengertian usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 mengingat lanskap dunia usaha yang terus berubah:(Sudati Sarfiah, Hanung Atmaja, 2019):

- a) Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dikuasai oleh perseorangan atau organisasi yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- b) Menurut undang-undang ini, usaha kecil adalah setiap usaha produktif secara ekonomi yang menjalankan usahanya sendiri dan bukan merupakan bagian atau cabang yang dimiliki sepenuhnya dari suatu perusahaan besar. Sebaliknya, mereka dikendalikan atau dikendalikan oleh orang atau badan yang tidak masuk dalam kategori usaha menengah atau besar.
- c) Perusahaan tidak dianggap sebagai Usaha Menengah apabila mempunyai, menguasai, atau terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan kekayaan, bersih, atau hasil penjualan tahunan yang besarnya ditentukan dalam Undang-undang ini. Sebaliknya, ini adalah perusahaan yang mandiri dan menghasilkan keuntungan secara ekonomi.
- d) Perusahaan swasta dan publik, perusahaan patungan, dan perusahaan internasional yang beroperasi di Indonesia semuanya dianggap sebagai perusahaan menengah. Perusahaan dengan pendapatan tahunan atau aset bersih lebih dari jumlah ini dianggap sebagai perusahaan signifikan.
- e) Badan usaha yang berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan perekonomian dalam negeri yang meliputi dunia usaha.

b. Peran UMKM

Pertumbuhan UMKM di Indonesia memberikan bukti mengenai gambaran fungsi UMKM di tanah air. Anda dapat melakukan studi kasus tentang bagaimana UMKM berkontribusi terhadap perekonomian. UMKM memainkan peran penting, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia dimana UMKM merupakan penyedia lapangan kerja utama. Ciri-ciri UMKM disebabkan oleh tiga faktor utama: 1) banyaknya jumlah UMKM, khususnya usaha mikro dan kecil (UMK) yang tersebar di wilayah pedesaan, termasuk kawasan lindung; 2) kelompok

usaha padat karya, khususnya perempuan dan pekerja berpendidikan rendah; dan 3) sebagian besar kegiatan UMK berbasis pada pertanian. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan penting dalam pembangunan perekonomian suatu bangsa. Usaha kecil dan menengah mempunyai nasib yang lebih baik dibandingkan perusahaan besar selama krisis keuangan tahun 1998. karena sebagian besar usaha kecil tidak terlalu bergantung pada uang tunai atau pinjaman dari sumber luar dalam jumlah besar dalam hal nilai tukar dolar. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan besar yang biasanya selalu mengumpulkan uang asing mempunyai potensi paling besar untuk merasakan dampak krisis yang melibatkan variasi nilai tukar. Khususnya di Indonesia, investasi perorangan merupakan mayoritas struktur modal UKM. Demi menggalang dana, tak sedikit dari mereka yang bekerja sama dengan pihak lain. Usaha Mikro dan Kecil (UKM) seringkali memiliki keunggulan dalam industri padat karya dan bergantung pada sumber daya alam seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, dan operasional restoran. Dalam industri perhotelan, perbankan, persewaan, jasa korporasi, dan kehutanan, perusahaan kecil memiliki keunggulan dalam hal nilai tambah. Setidaknya, hal-hal berikut ini menyoroti peran UMKM dalam perekonomian Indonesia: 1) mereka merupakan peserta utama dalam berbagai kegiatan perekonomian; 2) mereka adalah pemberi kerja terbesar; 3) berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat; 4) membuka pasar baru dan menjadi sumber inovasi; dan 5) mendukung pemberdayaan neraca melalui kegiatan ekspor.

c. Ekonomi Syariah

Perekonomian yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah disebut sebagai ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Selanjutnya, perbuatan atau usaha usaha yang dilakukan oleh orang, organisasi, atau non-organisasi sesuai dengan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan komersial dan nonkomersial termasuk dalam pengertian ekonomi syariah.(Hardiati, N., Widiyana, S., & Hidayat, 2021). Termasuk bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah, reasuransi syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, program pensiun bank syariah, dan perusahaan syariah.

d. Pembangunan Ekonomi

Meningkatkan kualitas hidup suatu negara dan menyeimbangkan pendapatan masyarakatnya, seperti yang ditunjukkan oleh pendapatan riil per kapita, dan memperhitungkan peningkatan populasi dikenal sebagai pembangunan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat berupa hal-hal non-fisik seperti teknologi dan ketenagalistrikan atau hal-hal fisik seperti gedung perkantoran, pertokoan, jalan raya, jalan tol, pelabuhan, dan bandara.(Hidayat et al., 2022). Menurut para ahli, pembangunan diartikan sebagai:

1. Sadono Sukirno (1996) Dengan mengubah kekuatan ekonomi potensial menjadi perekonomian aktual melalui investasi modal, penggunaan teknologi, perolehan pengetahuan dan keterampilan, serta peningkatan kemampuan organisasi dan manajerial, pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
2. Adam Smith Proses menggabungkan ekspansi populasi dengan kemajuan teknis dikenal sebagai pembangunan ekonomi.
3. Irawan, 2002:5 Pendapatan riil per kapita suatu negara berfungsi sebagai ukuran kemajuan ekonomi, yang merupakan hasil dari serangkaian inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup.
4. Menurut Lincoln Arsyad (2010),Pertumbuhan GNP selama satu tahun bukanlah satu-satunya aspek kemajuan ekonomi. Tidak hanya satu aspek (ekonomi) kehidupan masyarakat saja yang tercakup dalam pembangunan ekonomi; sebaliknya, ini memiliki banyak segi. Setiap tindakan yang dilakukan suatu negara untuk meningkatkan kualitas hidup warganya dan memajukan perekonomiannya disebut pembangunan ekonomi. Dengan mempertimbangkan pembatasan-pembatasan ini, pertumbuhan ekonomi secara umum dipahami sebagai suatu proses yang, seiring waktu, menghasilkan peningkatan pendapatan riil per kapita suatu negara sekaligus mendorong perubahan dalam kerangka kelembagaan.

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh para ahli, komponen dan ciri utama pembangunan ekonomi berikut dapat diidentifikasi:

- a. Upaya jangka panjang untuk meningkatkan pendapatan per kapita secara konsisten.

- b. Perubahan yang terus-menerus.
- c. Peningkatan kerangka kelembagaan di semua bidang (seperti politik, hukum, sosial, dan budaya).

Agar pengaruhnya dapat dirasakan dalam meningkatkan kegiatan perekonomian dan menaikkan taraf kesejahteraan masyarakat dari suatu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik tinjauan pustaka atau sering disebut dengan penelitian kepustakaan (*library study*) yang dipadukan dengan strategi penelitian kualitatif. Pemahaman komprehensif terhadap fenomena atau kejadian sosial tertentu ditekankan dalam penelitian kualitatif. Agar dapat memahami permasalahan penelitian secara menyeluruh, peneliti menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan menggunakan bahan sekunder dari buku, artikel jurnal, makalah, dan sumber lainnya. penggunaan teknik penelitian perpustakaan reguler untuk mengumpulkan data untuk studi kualitatif. Para sarjana mungkin membangun kerangka teoretis dan kontekstual untuk penelitian mereka saat ini dengan berkonsultasi dengan penelitian terkait sebelumnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran UMKM dalam perspektif syariah, mengidentifikasi tantangan, dan memberikan rekomendasi kebijakan

Dalam kerangka ekonomi syariah, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM memberikan kesejahteraan komunal sesuai dengan prinsip syariah selain berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi.

UMKM merupakan penyedia lapangan kerja yang signifikan, membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal, UMKM berkontribusi pada pengembangan ekonomi di daerah masing-masing. Ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam ekonomi syariah. UMKM syariah sering kali terhubung dengan lembaga keuangan syariah, memberikan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah tanpa riba. Dalam perspektif syariah, UMKM membantu mencapai distribusi kekayaan yang lebih adil, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Meskipun memiliki peran penting, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat pertumbuhannya:

- a. Akses Terbatas ke Modal: Banyak pelaku UMKM kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal karena kurangnya jaminan dan pemahaman tentang produk keuangan syariah.
- b. Pendidikan dan Pelatihan: Kurangnya pengetahuan tentang manajemen bisnis dan prinsip-prinsip ekonomi syariah menjadi hambatan bagi pelaku UMKM untuk berkembang.
- c. Regulasi yang Rumit: Proses perizinan dan regulasi yang kompleks seringkali menjadi kendala bagi UMKM untuk beroperasi secara legal dan efisien.
- d. Persaingan dengan UMKM Konvensional: UMKM syariah harus bersaing dengan pelaku usaha konvensional yang mungkin memiliki sumber daya lebih besar dan lebih banyak pengalaman.

Untuk mengoptimalkan kontribusi UMKM dalam perekonomian syariah, beberapa rekomendasi kebijakan dapat dipertimbangkan:

- a. Peningkatan Akses Pembiayaan: Pemerintah perlu mendorong lembaga keuangan untuk menyediakan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah bagi UMKM. Ini bisa dilakukan melalui skema pembiayaan berbasis bagi hasil.
- b. Pelatihan dan Pendidikan: Mengadakan program pelatihan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang manajemen bisnis dan prinsip-prinsip syariah. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan dapat memperkuat inisiatif ini.
- c. Simplifikasi Regulasi: Mempermudah proses perizinan untuk UMKM agar mereka dapat beroperasi lebih efisien. Kebijakan ini harus disertai dengan sosialisasi agar pelaku usaha memahami prosedur yang ada.
- d. Dukungan Pemasaran: Pemerintah dapat membantu memasarkan produk-produk UMKM melalui platform digital dan pameran lokal untuk meningkatkan visibilitas produk mereka di pasar.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan peran UMKM dalam perspektif syariah dapat lebih maksimal, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

UMKM berperan penting dalam mengatasi pengangguran, menciptakan produk lokal yang beragam, dan mendukung ekonomi yang inklusif di kota Medan

UMKM di Kota Medan berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa UMKM dapat menyerap tenaga kerja hingga 60.400.000 orang, yang setara dengan 87,5% dari total angkatan kerja di kota tersebut. Dengan jumlah UMKM yang terus meningkat, terutama setelah dampak pandemi COVID-19, mereka menjadi alternatif bagi individu yang kehilangan pekerjaan untuk menciptakan lapangan kerja baru (Syahputra et al., 2023). Penelitian menunjukkan bahwa kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai 14,8%. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran yang meningkat selama beberapa tahun terakhir.

Banyak orang yang terdampak pengangguran memilih untuk membuka usaha sendiri, sehingga meningkatkan jumlah UMKM di kota Medan (Dongoran et al., 2016). Hal ini juga memberikan peluang bagi individu untuk berwirausaha dan mandiri secara ekonomi. UMKM di Medan tidak hanya berfokus pada satu jenis produk tetapi mencakup berbagai sektor, termasuk kuliner tradisional, kerajinan tangan, dan industri kreatif. Keberagaman ini tidak hanya memperkaya pasar lokal tetapi juga memperkenalkan produk-produk unik dan khas daerah kepada masyarakat luas. Dengan adanya produk lokal yang beragam, UMKM tidak hanya meningkatkan pilihan bagi konsumen tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan barang dan jasa yang relevan dengan kebutuhan mereka (Panjaitan et al., 2024). UMKM mendorong inovasi dan kreativitas dalam menciptakan produk baru yang sesuai dengan tren pasar. Hal ini penting untuk mempertahankan daya saing di pasar yang semakin kompetitif.

UMKM memainkan peran kunci dalam pemberdayaan masyarakat. Mereka memberikan pelatihan keterampilan dan akses ke modal bagi individu yang kurang beruntung secara ekonomi, membuka peluang untuk memulai usaha sendiri. Melalui berbagai program pembinaan dan pelatihan yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga swasta, pelaku UMKM mendapatkan dukungan untuk mengembangkan usaha mereka. Ini menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif. Dengan memberdayakan individu untuk menjadi pengusaha mandiri, UMKM membantu mengatasi masalah kemiskinan. Mereka memberikan kesempatan kepada orang-orang yang sebelumnya terpinggirkan untuk berpartisipasi dalam ekonomi formal.

Secara keseluruhan, peranan UMKM di Kota Medan sangat vital dalam menciptakan lapangan kerja, mendiversifikasi produk lokal, serta mendukung ekonomi inklusif. Dengan

dukungan dari pemerintah dan masyarakat, UMKM dapat terus tumbuh dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.

Kontribusi UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Medan

UMKM di Kota Medan berfungsi sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Dengan lebih dari 38.000 unit usaha terdaftar, UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Sektor ini mencakup berbagai bidang, mulai dari kuliner tradisional hingga industri kreatif, yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Kontribusi UMKM:

- a. Penciptaan Lapangan Kerja: UMKM berhasil menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran di Kota Medan, dengan kontribusi signifikan terhadap pendapatan rumah tangga.
- b. Diversifikasi Ekonomi: UMKM memperkenalkan produk lokal yang unik, mendukung keberagaman dan stabilitas ekonomi.
- c. Pemberdayaan Masyarakat: UMKM memberikan peluang ekonomi bagi berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.

Pemerintah Kota Medan memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan UMKM melalui berbagai kebijakan dan program. Beberapa inisiatif yang telah dilakukan meliputi:

- a. Pendampingan dan Pelatihan: Pemerintah menyediakan program pendampingan untuk membantu UMKM memasuki pasar pengadaan barang dan jasa lokal. Ini termasuk pelatihan manajemen usaha, pemasaran, dan akses ke sumber daya.
- b. Regulasi dan Legalitas: Memfasilitasi perizinan usaha untuk mendorong UMKM beroperasi di sektor formal, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal.
- c. Dukungan Finansial: Meningkatkan akses pembiayaan melalui kerjasama dengan lembaga keuangan untuk memberikan modal yang dibutuhkan oleh UMKM.

Lembaga keuangan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses pembiayaan yang lebih baik bagi UMKM. Ini dapat dilakukan melalui:

- a. Penyediaan Produk Keuangan Syariah: Mengembangkan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk menarik lebih banyak pelaku usaha Muslim yang ingin memulai atau mengembangkan bisnis mereka.
- b. Edukasi Keuangan: Memberikan pelatihan tentang manajemen keuangan kepada pelaku UMKM agar mereka dapat mengelola dana dengan lebih efisien.

Keterlibatan Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi berperan penting dalam pengembangan kapasitas SDM di sektor UMKM melalui:

- a. Program Pendidikan dan Pelatihan: Menyediakan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri serta program pelatihan keterampilan bagi pelaku UMKM.
- b. Riset dan Inovasi: Melakukan penelitian untuk mengidentifikasi tren pasar dan inovasi produk yang dapat membantu UMKM bersaing di pasar lokal maupun global.

Ekonomi syariah menawarkan pendekatan inklusif dalam pengembangan UMKM. Dengan mayoritas penduduk Kota Medan beragama Islam, ada potensi besar untuk mengembangkan sektor ini melalui:

- a. Penerapan Prinsip Syariah: Mendorong UMKM berbasis syariah untuk beroperasi dengan prinsip keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata.
- b. Sertifikasi Halal: Memfasilitasi proses sertifikasi halal bagi produk-produk lokal untuk meningkatkan daya saing di pasar.

Untuk mengoptimalkan kontribusi UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Kota Medan, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, serta pengembangan ekonomi syariah. Melalui dukungan yang terintegrasi ini, diharapkan UMKM dapat tumbuh lebih kuat, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat perekonomian lokal secara keseluruhan.

5. KESIMPULAN

UMKM di Kota Medan berfungsi sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Mereka berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan diversifikasi produk, serta membantu dalam pemberdayaan masyarakat. Sekitar 99% unit usaha di Medan adalah UMKM, yang menyumbang 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Meskipun memiliki potensi besar, UMKM dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk akses terbatas terhadap modal, pendidikan yang kurang memadai, dan regulasi yang tidak mendukung. Hal ini menghambat kemampuan mereka untuk berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan ekonomi syariah.

Artikel ini merekomendasikan perlunya dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan, dan universitas untuk mengatasi tantangan yang dihadapi UMKM. Kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM berbasis syariah sangat penting untuk mengoptimalkan kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, UMKM dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat di Kota Medan. Ini termasuk penciptaan produk lokal yang beragam dan dukungan terhadap ekonomi inklusif.

Secara keseluruhan, artikel ini menekankan bahwa pengembangan UMKM dalam konteks ekonomi syariah tidak hanya penting untuk pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR REFERENSI

- Arifudin, O. (2020). Pendampingan peningkatan inovasi produk makanan khas Subang Jawa Barat. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(6), 1094–1106.
- Ariza, R. A., & Aslami, N. (2021). Analisis strategi pemasaran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada era digital di Kota Medan. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 1(2), 188–194. <https://doi.org/10.47467/visa.v1i2.834>
- Dongoran, F. R., Nisa, K., Sihombing, M., & Purba, L. D. (2016). Analisis jumlah pengangguran dan ketenagakerjaan terhadap keberadaan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Medan. *2(2)*, 59–72.
- Halim, A. (2020). Pengaruh pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 157–172. <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP/article/view/39>
- Hardiati, N., Widiana, S., & Hidayat, S. (2021). Model-model penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 1(5), 485–497.

- Hidayat, A., Lesmana, S., & Latifah, Z. (2022). 2217-Article Text-5734-2-10-20221128. *Jurnal Inovasi Penelitian (JIP)*, 3(7), 7109–7116. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/2133>
- Labetubun, M. A. H. (2021). *Sistem ekonomi Indonesia*. Widina Bhakti Persada.
- Panjaitan, D. T. M. R., Soetarto, & Tambunan, Y. E. (2024). Peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Studi di Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah). *Jurnal Darma Agung*, 32(1), 67–76.
- Sofyan, A. T. (2021). Resiliensi dan inovasi UMKM sebagai penggerak pemulihan ekonomi. *Jurnal Visionary: Penelitian dan Pengembangan Di bidang Administrasi Pendidikan*, 9(2), 57. <https://doi.org/10.33394/vis.v9i2.4828>
- Sudati Sarfiah, Hanung Atmaja, & D. V. (2019). UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 1–189.
- Syahputra, A., Harahap, I., Kaswinata, & Nawawi, Z. M. (2023). The significance of small and medium enterprises (SMEs) in economic development in the city of Medan from an Islamic perspective. 6(November), 718–728.